

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Idlib merupakan sebuah provinsi Suriah yang terletak di barat laut. Lokasinya yang berbatasan darat dengan Turki menjadikan Idlib sebagai tempat strategis untuk menyusun kembali kekuatan sekaligus tempat kabur bagi personel pemberontak yang kalah. Adapun beberapa tempat di Suriah yang menjadi ‘benteng terakhir’ kelompok pemberontak seperti Homs, Ghouta Timur, Daraa, Aleppo, dan Idlib sebagai tempat terbesar yang dapat dikuasai kelompok-kelompok pemberontak sekaligus penentu dari perang berkepanjangan yang terjadi di Suriah (Salaymeh & Acun, 2018, p. 2).

Dalam perkembangannya, Idlib merupakan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai zona de-eskalasi militer sejak 2017 melalui Perjanjian Astana, Kazakhstan. Di tahun 2018, perjanjian wilayah tersebut disusul dengan stabilisasi yang diperkuat oleh Russia dan Turki setelah keduanya menandatangani MoU Perjanjian Sochi di tahun 2018. Perjanjian tersebut dibentuk guna menghindari seramngan-serangan besar dari rezim Assad terhadap pemberontak di wilayah Idlib. Lebih lanjut dalam zona tersebut melarang keras semua pihak untuk membawa dan memakai persenjataan berat, tank, sistem rudal dan mortar (Salaymeh & Acun, 2018, p. 4). Sumber masalah lain di wilayah tersebut datang dari pemberontak berhaluan Islam garis keras/radikal. Salah satu yang paling dominan dalam wilayah tersebut yakni

Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok pemberontak Islam garis keras yang merupakan pecahan dari Al-Qaida.

Selain HTS, kepentingan Assad untuk menguasai secara penuh atas Idlib ditekankan pada pembasmian kelompok-kelompok pemberontak dari kalangan oposisi bersenjata, yang kemudian bersatu di bawah nama *National Liberation Front* (NLF). NLF adalah kelompok pemberontak yang sudah dicap sebagai teroris oleh Assad, terlepas dari HTS, ISIS dan Al-Qaida (apnews.com, 2018). Sebagai kelompok oposisi, NLF digadang-gadang dapat merubah Suriah dengan nilai sekuler yang sama persis dengan barat.

Kelompok seperti NLF mendambakan penerapan demokrasi dengan memandang model demokrasi gaya Barat, dan menyuruh Assad untuk turun dari kepresidenan. Berbeda dengan kelompok pegiat jihad, kelompok oposisi dan pemberontak menunjukkan impian mereka akan Suriah yang jauh dari fanatisme agama dan ekstrimisme. Mereka dengan lantang mendukung toleransi agama, kesetaraan, kebebasan berekspresi dan sebuah konstitusi yang menaruh hormat pada agama-agama namun tetap sekuler (Pollock, 2012). Dari sini pernyataan dari NLF cukup tegas yakni untuk memberi ruang dan menghormati hak-hak minoritas dalam parlemen dan untuk bisa mengkritik mayoritas atas perbuatan apapun. Inilah yang membuat pihak asing lantas tidak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk andil dalam peperangan sipil Suriah melalui sejumlah bantuan yang diberikan pada pemberontak.

Pada tahun 2013, barat dan sekutunya di Timur Tengah yang notabene anti Assad menggelontorkan dana sebesar \$60 juta kepada kelompok pemberontak agar dapat menyerang pemerintah (Harmiyati, 2018). Dengan jumlah suplai bantuan yang sedemikian besar, hal ini disinyalir akan menjadikan peperangan Suriah sebagai medan kepentingan kekuasaan eksternal. Selain itu, dari bantuan tersebut menguatkan kemungkinan akan faktor penyebab bertahannya para pemberontak di daerah yang mereka duduki sampai sekarang. Di sisi lain, keberadaan pemberontak di Idlib tidak serta merta membawa citra sebagai pemberontak cinta damai yang melawan tiran Assad yang. Manuver mereka di Idlib dinilai kontras bila dibenturkan dengan realitas di lapangan.

Hal kontras terjadi manakala kelompok pemberontak dengan tega menggunakan Idlib dan warganya sebagai tameng untuk menghindari serangan-serangan pemerintah. Laporan dari *Human Right Watch* (HRW) mengatakan di tahun 2013 terdapat sekitar 190 warga sipil meregang nyawa akibat kebengisan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak (CBS News, 2013). Jumlah sebenarnya diperkirakan mencapai lebih dari 190 korban setelah ditemukannya kuburan massal yang menambah kesulitan dalam proses identifikasi. Seperti halnya beberapa tempat wilayah lain, Idlib memang menjadi saksi mata perilaku keji dari kelompok-kelompok tersebut. Dari penuturan warga setempat, mereka mengaku kerap diancam, diculik, dan bahkan dibunuh oleh para personel pemberontak jika mereka menolak membantu atau menghalangi rencana

pemberontak (clovekvtidni.cz, 2018). Oleh karena itu pemerintah Suriah tidak tinggal diam. Melalui segala upaya militer yang ada, pasukan pemerintah terus menggempur Idlib yang disinyalir selain sebagai benteng terakhir para pemberontak juga sebagai medan krusial bagi kemenangan Assad menumpas musuh-musuhnya.

Selain penggunaan sumber daya militer, Suriah juga aktif secara diplomasi dalam kancah internasional, terutama upaya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Tidak ketinggalan, Suriah acap kali mengirim utusannya ke forum internasional guna menangkal tekanan-tekanan dan publisitas kebohongan yang kerap ditujukan kepada Assad. Di lain kesempatan Suriah juga memanfaatkan forum PBB sebagai sarana promosi nilai dan kepentingan nasional Suriah. Suriah terus mengirim utusan yang tidak main-main walaupun pada praktiknya delegasi Suriah masih mendapat ancaman dari negara-negara lain.

Sementara itu, respon dari pemerintah Suriah sendiri melalui menteri luar negerinya, al-Moallem dalam sesi konferensi PBB menegaskan tidak akan ada undang-undang baru. Dia menambahkan, akan terus menolak rumusan undang-undang yang menyebabkan intervensi langsung dalam urusan domestik Suriah, maupun yang mengarah pada intervensi tersebut (Mroue, 2019). Pernyataan keras delegasi tersebut menyiratkan pesan bahwa ancaman yang tengah berlangsung bersifat multi dimensional-dua arah. Bentuk ancaman yakni ancaman terhadap keamanan wilayah oleh kelompok-kelompok pemberontak dan pegiat jihad, dan

ancaman terhadap konstitusi negara oleh para pemberontak kalangan oposisi bersenjata.

Terlepas dari ancaman dari dimensi keamanan dan politik domestik, Provinsi Idlib merupakan wilayah vital dilihat dari dimensi ekonomi, hubungan luar negeri dan humaniter. Dari dimensi ekonomi, Idlib merupakan wilayah Idlib merupakan rute perdagangan strategis yang terletak diantara Aleppo dan Latakia. Idlib mengubungkan beberapa kota besar seperti ibu kota Suriah, Damaskus, dan Latakia ke Aleppo. Rute-rute tersebut merupakan serangkaian rute perdagangan strategis berprospek besar dan pintu menuju laut Mediterania yang masyhur dan melegenda sebagai sebuah pelabuhan komersil (Yesiltas & Ozkizilcik, 2019, p. 20). Dengan dikuasainya Idlib oleh kelompok pemberontak, maka kemungkinan besar akan mendisrupsi perekonomian nasional Suriah.

Selain dimensi ekonomi, Idlib juga merupakan daerah pivot dilihat dari dimensi hubungan luar negeri Suriah dengan negara sahabat seperti Rusia. Russia sebagai sekutu dari Suriah memiliki kepentingan untuk mengambil kembali Idlib dari tangan pemberontak dengan cara apapun. Hal ini dilakukan Rusia mengingat Idlib merupakan wilayah yang menghubungkan Latakia dan Tartus, dimana di kedua provinsi tersebut Rusia memiliki pangkalan udara Hmeimim di Latakia, dan fasilitas angkatan laut di Tartus (Mudore & Safitri, 2019, p. 7). Tidak mengherankan jika Rusia terus mau bertarung dengan pengerahan sumber daya militer yang tidak setengah-setengah. Sebagai pihak yang berkepentingan, peran

Rusia di Suriah dapat dikatakan sarat akan makna dan bukan urusan bilateral belaka. Kehadirannya di Suriah dihadapkan dengan hegemoni musuh bebuyutannya, Amerika Serikat, yang semakin menjadi-jadi melalui sekutu Timur Tengahnya yang paling utama, Arab Saudi dkk. Oleh karena itu kepentingan Rusia di Suriah dimaknai sebagai upaya penangkalan pengaruh AS dan Saudi.

Dan yang terakhir dari dimensi humaniter. Laporan terakhir menunjukkan Idlib sebagai wilayah dengan penduduk yang berstatus pengungsi mencapai 2/3 dari total populasi. Sementara sebanyak 600.000 terpaksa meninggalkan rumah mereka (EASO, 2020, p. 15). Kehidupan para pengungsi sangat tidak layak karena mereka hanya tinggal di tenda-tenda pengungsian tanpa akses fasilitas publik yang memadai. Selain itu mereka kerap merasa tergoncang karena hidup mereka di tengah desingan peluru dan ledakan misil-misil akibat pertempuran. Hidup para pengungsi semakin menderita terlebih saat musim dingin dikarenakan tidak adanya kesiapan dan alat-alat pendukung yang memadai (EASO, 2020, p. 16). Dampak dari pertempuran yang tidak hanya mengenai fisik tapi juga psikologis para pengungsi akan membuat jera siapapun yang berada di kondisi tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan Idlib menjadi pusat perhatian dunia dengan ditetapkannya kota tersebut sebagai krisis kemanusiaan ditengah Situasi yang kian Dengan demikian pertempuran Idlib akan menentukan relevansi kepentingan nasional Suriah dengan urgensinya untuk menumpas ancaman terkait keamanan negara.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka penulis mendapatkan rumusan masalah berupa: “wilayah Idlib yang kecil dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain di Suriah ternyata dianggap begitu penting bagi Al-Assad hingga dirasa harus mengamankan Idlib dengan cara apapun termasuk penggunaan sumberdaya militer untuk memerangi pemberontak”

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

“Bagaimana aktor-aktor terlibat dalam pertempuran Idlib pada kurun 2018-2020 dalam konsen kepentingan nasional Suriah di bidang keamanan?”

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

“Mengetahui pertempuran Idlib pada tahun 2018-2020 menjadi konsen dengan kepentingan Nasional Suriah di bidang keamanan di bawah Bashar Al-Assad”

Adapun manfaat yang ingin didapatkan penulis dari penelitian yaitu mengetahui prioritas pertempuran Idlib sebagai bagian dari kepentingan nasional Suriah di bidang keamanan.

## **1.5 Kerangka Teori**

Sedangkan konsep dari kepentingan nasional itu sendiri adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Substansi dari kepentingan nasional umumnya berupa survivalitas

dari suatu bangsa, kesejahteraan, dan keamanan (lumenlearning.com, 2016). Berbeda dengan ini Hans J. Morgenthau menyebutkan ada tiga konsep kepentingan nasional yaitu pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional harus dirumuskan secara rasional dan memiliki sifat fleksibel (Nurhaliza, 2019, p. 20). Sebagai sesuatu yang di formulasikan secara rasional, oleh karena itu kepentingan dapat diberlakukan layaknya hukum, yaitu harus dipatuhi oleh negara tersebut dalam bentuk realisasi kewajiban. Adapun bentuk –bentuk kewajiban yaitu perlindungan fisik, politik, identitas budaya dari ancaman negara lain. Dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional itu berpusat pada perlindungan diri sebuah bangsa dari ancaman dari lingkungan internasional.

Setiap negara tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan nasionalnya. Latar belakang dari perumusan kepentingan nasional merupakan sarana dan tujuan dalam memenuhi keutuhan bangsanya. Konsep kepentingan nasional adalah inti dari kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, konsep kepentingan nasional sangatlah penting, urgensi untuk memahami kepentingan nasional diperlukan dalam menganalisa perilaku sebuah negara dalam skala domestik dan internasional. Kaum realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya suatu negara untuk mengejar kekuatan, dimana kekuatan adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian dapat melalui teknik



pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sarana sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.

Terdapat empat komponen dasar dalam pengupayaan kepentingan nasional yaitu kepentingan pertahanan tanah air, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan akan promosi nilai-nilai (Nuchterlein, 2001, p. 20). Kepentingan pertahanan tanah air terkait dengan upaya negara dalam melindungi kedaulatannya dari ancaman negara-negara lain. Kepentingan ekonomi berkaitan dengan upaya negara dalam melindungi dan menaikkan taraf ekonomi agar tercipta kemakmuran. Misal, negara masuk kedalam sebuah organisasi regional yang bergerak di bidang ekonomi yang menyediakan fitur bebas tarif dan kuota bagi para anggotanya, maka hal tersebut dapat memberi keuntungan terhadap jalannya perekonomian negara. Kepentingan tatanan dunia adalah upaya negara untuk menjaga stabilitas perdamaian dunia, terutama dalam skala intra kawasan dan negara-negara tetangga. Yang keempat yaitu promosi nilai-nilai, kepentingan ini berkaitan dengan penyebarluasan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah negara, untuk ditunjukkan kepada negara lain sehingga negara tersebut mendapat pengakuan eksistensi di ruang internasional.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional yang diterapkan dalam bidang keamanan. Hal ini akan membantu

penulis dalam membedah motif Assad dalam mempertahankan Idlib relevansinya dengan kepentingan nasional Suriah di bidang keamanan.

## **1.6 Tinjauan Pustaka**

Penelitian perihal analisa Pertempuran Idlib 2018-2020 sebagai konsen Kepentingan nasional Suriah dalam bidang keamanan di bawah Bashar Al-Assad adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk ancaman terhadap kedaulatan Suriah di bawah Bashar al-Assad sekaligus urgensi pemerintah untuk kembali menguasai Idlib dari tangan pemberontak. Sebagai bahan pembanding sekaligus pelengkap, peneliti akan mengulas beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini.

### **Penelitian Alatas**

Alatas (2019) dalam artikel jurnal yang berjudul *Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki, Studi Kasus: Pertempuran Rojava 2019*. Penelitian ini menjelaskan fenomena konflik perbatasan antara Suriah dan Turki yang memiliki dampak multi dimensional, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dijelaskan bahwa kedatangan para pengungsi dari Suriah telah menimbulkan ketidaknyamanan warga Turki dan mengganggu stabilitas ekonomi, dan sosial Turki, akibatnya menurunkan tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan Erdogan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pengungsi Suriah di Turki yang awalnya didasarkan pada kebijakan turki *zero problem with neighbor* dengan mengedepankan kesamaan identitas sebagai

muslim, berubah seketika para pengungsi memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan kelanggengan politik kekuasaan Erdogan.

Jurnal tersebut tentu saja berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam skripsi ini. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada kepentingan nasional Suriah dalam bidang keamanan terkait pertempuran Idlib 2018-2020, bukan dalam hal geopolitik Turki terkait pertempuran Rojava sebagaimana dalam jurnal tersebut. Selain itu, dalam jurnal tersebut hanya membahas Turki dan perpolitikan domestiknya, sehingga dapat terlihat jelas perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan.

#### **Penelitian Salaymeh dan Can**

Salaymeh dan Can (2018) dalam artikel yang berjudul *Sochi Agreement: Implications on the Ground and upcoming Challenges* membahas pengaruh-pengaruh dari Perjanjian Sochi terhadap keamanan dan stabilisasi kawasan Idlib. Penjelasan tersebut didukung fakta bahwa Idlib telah dijadikan kawasan deeskalasi militer yang disepakati oleh Turki Rusia dan Iran, dimana persenjataan berat, tank, mortar serta kekerasan fisik melalui kekuatan militer dilarang tersebut.

Dengan demikian dapat dibedakan antara jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan dikarenakan jurnal tersebut belum mengalami aktualisasi data. Hal ini dikarenakan telah terjadi manuver-manuver yang dilakukan oleh aktor-aktor besar didalamnya, termasuk eskalasi di Idlib mengubah jalannya pertempuran. Namun disini penulis juga akan menggunakan

data dari jurnal ini guna memprediksi kelanjutan pertempuran Idlib dan nasib dari kepentingan nasional Suriah.

### **Penelitian Yonker**

Yonker (2018) dalam artikel yang berjudul *Wither the Syrian Ba'ath? Down, but Not Out* menjabarkan pengaruh dari partai Ba'ath Suriah yang semula memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan Suriah kian menurun di bawah Bashar al-Assad. Dijelaskan bahwa partai Baath mencoba mendapat simpati dan memperluas pengaruhnya dengan membentuk angkatan bersenjata Ba'ath Battalions untuk meringankan tugas *Syrian Arab Army* dalam pengamanan di daerah-daerah yang dikontrol rezim Assad.

Perbedaan terletak pada topik bahasan. Jurnal tersebut memiliki fokus terbatas pada gerakan yang dilakukan oleh partai Baath dalam melanggengkan kekuasaan atas konstitusi Suriah. Walaupun disitu dikatakan cabang militer dari partai Ba'ath turut andil dalam bidang keamanan, namun mereka tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran-pertempuran melawan kelompok pemberontak. Selain itu Partai Baath terlihat tidak memiliki kuasa yang besar atas perumusan kepentingan nasional Suriah, namun pada poin ini mereka tetap memiliki andil dalam perumusan kebijakan tersebut.

### **Penelitian CSIS**

Penelitian yang dilakukan oleh *Center For Strategic and International Studies* (CSIS) melalui laporannya yang berjudul *Idlib Province and the Future of Instability in Syria* menjelaskan urgensi dari Provinsi Idlib, dan bagaimana

geopolitik di wilayah tersebut memiliki aspek vital bagi keberlangsungan perang sipil Suriah. Disebutkan bahwa kemenangan pasukan pemerintah atas pertempuran Idlib akan membawa dampak positif-negatif bagi pihak-pihak yang selama ini telah membuat kekacauan. Hal ini juga menjelaskan bahwa segala maneuver baik yang dilakukan oleh pemerintah dan pemberontak dalam mengamankan wilayah tersebut di satu sisi akan menimbulkan jiwa dari kalangan sipil.

Dari laporan tersebut perbedaan terlihat bahwa topik bahasan terlalu general dan kurang spesifik. Selain itu kurangnya perspektif wilayah Idlib dilihat dari kacamata pemerintah Suriah menjadikan laporan tersebut terlalu terdistraksi dari tujuan kepentingan nasional negara tersebut. Terlepas dari itu penulis akan menggunakan beberapa detail dari data-data yang ada untuk menjelaskan realitas dari geopolitik Provinsi Idlib.

### **1.7 Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha menjawab pertanyaan penelitian dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, serta menganalisa data-data yang diperoleh dari proses penelitian, atau yang disebut penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa dokumen. Selain itu penulis juga menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari bacaan dari buku-buku, jurnal ilmiah, koran dan situs-situs internet terkait.

Untuk buku, penulis mengambil data dari Prahara Suriah karya Dina Sulaeman<sup>1</sup>. Jurnal penulis banyak mengambil dari *SETA Analysis*, *Royal United Services Institute for Defence and Security Studies* (RUSI), dan *Institute Study of War* (ISW). Adapun sejumlah situs berita daring guna aktualisasi data dalam penelitian seperti Al-Jazeera dan Sputnik News sebagai penyeimbang.

Selanjutnya, pengolahan data yang didapat akan dianalisis secara berkelanjutan. Data-data yang diperoleh akan dilanjutkan dengan proses verifikasi untuk menguji dan memperoleh keakuratan data. Data tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan untuk selanjutnya dilakukan proses interpretasi hasil analisis, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan bisa diterapkan dalam penelitian untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan penelitian.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi skripsi ini menjadi lima bab pembahasan. Sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab sebagai berikut:

**BAB 1** adalah pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan .

---

<sup>1</sup> Dina Sulaeman merupakan seorang peneliti dengan spesialisasi Timur Tengah. Dia juga saat ini menjabat sebagai direktur Indonesia *Center of Middle East Studies* (ICMES). Untuk informasi terkait tulisan-tulisannya lihat di [www.dinasulaeman.com](http://www.dinasulaeman.com)

**BAB 2** membahas mengenai Kontestasi Politik di Suriah. Pada bab ini penulis akan lebih lanjut membahas dinamika politik Sebelum *Arab spring* di Suriah.

**BAB 3** dalam bab ini nantinya akan dibahas dinamika pada saat *Arab spring* di Suriah. Berikut dengan pertempuran-pertempuran Homs, Aleppo, Idlib dan Ghouta

**BAB 4** membahas mengenai campur tangan pihak asing dalam perang Suriah. Lebih lanjut penulis akan membahas faksi-faksi baik yang terlibat dalam perang Suriah serta implikasinya terhadap wilayah Idlib.

**BAB 5** merupakan bab terakhir dan penutup dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.